

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Pemberdayaan KUKM Dalam Era Otonomi Daerah

KUKM sebagai pelaku pembangunan, diharapkan mampu berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi, oleh karena itu agar KUKM mampu tumbuh dan bergerak lebih luas diberbagai sektor usaha, perlu diberikan dukungan fasilitasi kebijakan, berbagai kemudahan, dan perlindungan.

Eksistensi KUKM yang mencapai 49,231.400 orang dan koperasi yang jumlahnya mencapai 141.314 unit dengan jumlah anggota mencapai 27 juta lebih memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi termasuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, bahkan dalam situasi krisis KUKM tetap tumbuh dan berkembang dalam melayani anggotanya.

Menurut catatan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2007) dan berbagai sumber, tahun 2007 KUKM mampu tumbuh sebesar 99,99% dalam dunia usaha, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13,48%, dan berkontribusi dalam menyumbang PDRB sebesar 53%. Untuk itu sejalan dengan otonomi daerah, KUKM masih memerlukan komitmen dan dukungan pemda dalam penyediaan kebijakan, kemudahan perijinan, perlindungan usaha, dan pembinaan secara berkelanjutan. Diharapkan KUKM mampu tumbuh dan berkembang pada ruang gerak yang lebih luas dan iklim yang kondusif, sehingga mampu membangun daya saing, produktivitas, dan efisiensi.

KUKM dalam melaksanakan aktivitasnya di berbagai sektor masih dihadapkan faktor keterbatasan dalam mengakses SDM, manajemen, pembiayaan, pasar, informasi, dan teknologi. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan KUKM dan otonomi daerah, permasalahan yang mendasar adalah ; 1) bagaimana kinerja KUKM selama ini, 2) sampai seberapa jauh komitmen pemda dalam memberdayakan KUKM serta faktor-faktor strategis apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan KUKM.

Di sisi lain dalam era otonomi daerah, peran KUKM dalam pembangunan ekonomi memiliki kontribusi di berbagai bidang yang nilainya dapat diandalkan, di lain pihak posisi KUKM masih dihadapkan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang mendasar, oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian dalam pemberdayaan KUKM.

Kajian ini dilakukan di 4 (empat) provinsi yaitu ; Sumsel, Banten, Jateng, dan Kalbar. Dengan menggunakan metode deskriptif terhadap berbagai variabel faktor internal dan faktor eksternal KUKM, survei lapangan terhadap 40 responden yang dipilih secara *purposive sampling* diharapkan data yang diolah dapat memberikan informasi dalam menyusun strategi pemberdayaan KUKM.

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari kajian ini adalah untuk: 1) Mengidentifikasi kinerja KUKM dalam era otonomi daerah, 2) Mengidentifikasi dukungan Pemda dalam mendukung pemberdayaan KUKM, 3) Menganalisis pengaruh berbagai faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pemberdayaan KUKM

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara konseptual memiliki kewenangan dalam mengolah potensi sumberdaya yang ada pada masing masing daerah. PEMDA bersama sama stakeholder (pemerintah pusat, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, swasta, dan perguruan tinggi secara bersama sama memberikan dukungan finansial (kredit, softloan, dan dukungan keuangan lainnya), dukungan non finansial (perda, peraturan, SK dan peraturan lainnya) untuk kepentingan KUKM.

Komitmen pemda di masing-masing provinsi komitmen cukup besar dalam meberdayakan KUKM. Dukungan pemda yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan daerah dan keputusan lainnya



dapat dilihat dari **alokasi APBD untuk kepentingan UKM** adalah : untuk provinsi Sumsel, Kalimantan Barat, Banten, dan Jateng pada tahun 2000 rata rata pertumbuhan alokasi APBD sebesar, -7.43 %, pada tahun 2001 sebesar 97.98 % pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar -6.70% tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 16.86%, tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 44.67 % pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 14.92% dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 3.03%, tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 3.91%. sedangkan **kompetensi pejabat yang membidangi pemberdayaan KUKM**, yang terdiri dari pemahaman, pendidikan, pengalaman, latar belakang jabatan, level dinas KUKM, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kompetensi pejabat yang membidangi pemberdayaan KUKM adalah sedang (75% responden menunjukkan bahwa kompetensi pejabat yang membidangi pemberdayaan KUKM sedang) sedangkan **peran Pemda dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM** di provinsi Sumsel, Kalbar, Banten, Jateng (kebijakan, dana, bantuan fisik, pelatihan, pendampingan, infrastruktur, manajemen adalah relatif sedang (75% responden menyatakan sedang) dari data diatas terlihat bahwa dukungan PEMDA terhadap KUKM adalah relatif besar. Sedangkan **perkuatan yang diberikan PEMDA kepada KUKM** (DIKLAT, pendampingan, temu bisnis, pameran, bantuan fisik, dana bergulir, kredit) adalah besar (83.33%responden menyatakan perkuatan yang diberikan pemda adalah besar)

Adapun kebijakan yang dibuat oleh PEMDA bersama stakeholder dalam pengembangan KUKM diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, sedangkan untuk pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dukungan PEMDA dan stakeholder kepada KUKM pasca otonomi daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan KUKM yaitu :

1. Kinerja koperasi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif rata rata pertumbuhan jumlah unit koperasi di 4 lokasi berkisar antara 2% sampai dengan 6 %, sedangkan persentase jumlah anggota berkisar antara 2 % sampai dengan 24 %, volume usaha mengalami rata rata pertumbuhan antara 14% sampai dengan 28 %, kecuali provinsi Banten mengalami penurunan sampai dengan -1 % untuk modal sendiri mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi antara -2% sampai 6% sedangkan modal luar mengalami peningkatan sebesar antara 1% sampai 23% (tingkat reliabilitas UKM semakin tinggi) sedangkan SHU mengalami peningkatan antara 7% sampai dengan 16%, dan tenaga kerja mengalami pertumbuhan positif antara 1 % sampai dengan 41 %



2. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah rata-rata menunjukkan perkembangan positif sebesar 3% di provinsi Sumatera Selatan, 4% di provinsi Kalbar, 4% di provinsi Banten, dan 17% di Jawa Tengah.
 3. Kinerja usaha mikro juga mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan rata-rata pertumbuhan aset antara 3% sampai 61%, dan pertumbuhan modal mengalami fluktuasi yang positif antara 4% s/d 15% kecuali provinsi Jawa Tengah, laba mengalami pertumbuhan sebesar 3% s/d 6%, dan penyerapan tenaga kerja 1% s/d 7%.
 4. Kinerja usaha kecil juga mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan rata-rata pertumbuhan aset antara 3% sampai 61%, dan pertumbuhan modal mengalami fluktuasi yang positif antara 5% s/d 11%, laba mengalami pertumbuhan sebesar 8% s/d 33%, dan penyerapan tenaga kerja 26% s/d 39%.
- A photograph showing the interior of a small retail store. The store is well-stocked with various goods on shelves. There are several pink and white banners hanging from the ceiling that say "LUCKY STRIKE". A person is visible behind the counter, and another person is partially visible in the foreground. The store appears to be a small-scale business, possibly a KUKM (Kategori Usaha Kecil Menengah).
5. Sedangkan kinerja usaha menengah juga mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dengan rata-rata pertumbuhan aset antara 2% sampai 19% kecuali Kalbar mengalami penurunan sebesar -1%, dan pertumbuhan modal mengalami fluktuasi yang positif antara 9% s/d 40%, laba mengalami pertumbuhan sebesar 2% s/d 6% kecuali usaha menengah di provinsi Kalimantan Barat, dan penyerapan tenaga kerja 37% s/d 51% kecuali usaha menengah di provinsi Kalbar.

Adapun faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pemberdayaan KUKM adalah :

1. faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pemberdayaan KUKM secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu : **Faktor eksternal** : Hambatan Masuk Pasar (Entry Barriers), Kekuatan Pemasok (Supplier power), Produk Pesaing (Substitute availability), Harga Pesaing (Price competitor), Pelanggan/Customer (Struktur demografi, cara pandang, kebiasaan), Kualitas Tenaga Kerja (Labor), Basis Sumberdaya Perusahaan (Finansial dan Fisik), Kekuatan Pembeli (Buyer Power), Pangsa Pasar (market Share), Fasilitas (Facilities), Bahan Baku (Raw Material), Kaliber Personal (Caliber of personel), Akses (aksesibilitas), Tingkat Suku Bunga, Pemasok (Supplier), Infrastruktur **Faktor internal** : aset yang dapat diraba (Fisik/Tangible), Aset yang tidak dapat diraba (Intangible), Organisasi, manajemen, pemasaran, kualitas manajemen Akutansi dan keuangan, Produksi/ Operasi, tenaga kerja, sistem informasi, organisasi/manajemen umum
2. Berdasarkan hasil analisis atas variabel-variabel internal dan eksternal, dengan menggunakan metode SWOT terlihat bahwa untuk **UKM, 1) UKM Sumsel**, perlu mengimplementasikan **Strategi Diversifikasi**, khususnya untuk industri makanan perlu diperhatikan diversifikasi pengembangan produk peningkatan kualitas dan untuk industri mebel perlu diperhatikan CSR (implementasi penggunaan finishing mebel yang ramah lingkungan) **2) UKM Kalbar**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif**, khususnya untuk produk makanan perlu ditingkatkan fokus pada makanan khas Kalimantan Barat, sedangkan untuk tekstil difokuskan pada produk eksklusif/handmade, demikian juga kerajinan perlu dukungan peningkatan promosi dan eksklusivitas produk yang ada **3) UKM Banten**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif**, strategi agresif untuk UKM provinsi Banten difokuskan pada perluasan pangsa pasar dan

promosi yang efektif, perlu dikembangkan kemitraan dengan perusahaan besar, untuk menerapkan *corporate social responsibility* (CSR). Secara khusus menurut *Hazard Analysis An Critical Control Point* (HACCP) untuk industri makanan perlu dipikirkan), sedangkan untuk industri jasa khususnya industri kreatif perlu diperkuat dengan informasi dan teknologi, dan untuk industri tekstil perlu peningkatan pada kualitas dan harga yang lebih kompetitif **4) UKM Jateng**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif** khususnya untuk industri tekstil perlu perluasan pangsa pasar serta pelayanan purna jual, demikian juga untuk industri makanan perlu orientasi pada CSR/ *corporate social responsibility* (implementasi HACCP : *Hazard Analysis An Critical Control Point*). Sedangkan untuk analisis atas variabel internal dan eksternal koperasi dengan metode SWOT terlihat bahwa, **1) Koperasi Sumsel**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif**, fokus pada pelayanan untuk industri makanan dan mebel sehingga mampu berfungsi sebagai funding support **2) Koperasi Kalbar**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif** fokus pada pelayanan untuk industri untuk koperasi di Kalbar perlu fokus pada industri makanan dan kerajinan, sehingga mampu berfungsi sebagai funding support bagi industri tersebut **3) Koperasi Banten**, perlu mengimplementasikan **Strategi Diversifikasi**, selain fokus pada industri makanan, jasa dan tekstil perlu berorientasi pada industri lain yang berkembang **4) Koperasi Jateng**, perlu mengimplementasikan **Strategi Agresif**, untuk koperasi di Jateng strategi agresif diorientasikan pada industri tekstil dan makanan, karena akan memberikan nilai tambah jika disertai perbaikan pelayanan

3. Faktor-faktor internal masih merupakan kelemahan yang cukup mempengaruhi Kinerja KUKM terutama hal hal yang berkaitan dengan **informasi dan teknologi** KUKM masih belum memiliki kapasitas SDM yang cukup dalam pengembangan dan penguatan informasi dan teknologi, sedangkan faktor-faktor eksternal merupakan ancaman yang serius Berkaitan Dengan Adanya Tingkat inflasi yang diprediksikan mengalami kenaikan, Perkembangan Kompetitor (lembaga keuangan lainnya, penetrasi pasar usaha yang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang bersaing) , Aspek Teknologi, Manajemen, dan dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.

Berdasarkan hasil kajian, disarankan :

1. Pemerintah Pusat/Kementerian Negara Koperasi dan UKM
 - a) Mengadakan monitoring terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemda, sehingga pemerintah pusat/Kementerian Negara Koperasi dan UKM dapat menjadi intermedias antara pemda dan KUKM;
 - b) Bekerjasama dengan pemda agar lebih memprioritaskan pemberdayaan KUKM (perkuatan manajerial yang menguntungkan KUKM);
 - c) Memposisikan sebagai partner dalam pemberdayaan KUKM.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - a. Menyusun database potensi daerah, koperasi dan UKM, sumber-sumber kekuatan yang dapat disinergikan antara lain upaya pemberdayaan KUKM yang berkelanjutan dan menjadi fasilitator dengan pihak eksternal (investor, pengusaha, dan pihak lain yang berkompeten);
 - b. Mereview kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam kaitannya dengan pemberdayaan KUKM, jika ada substansi yangh dirasakan menghambat, perlu dipertimbangkan untuk direvisi;
 - c. Memposisikan pemerintah pusat/kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai partner dalam membuat kebijakan daerah yang akan dikeluarkan dalam pemberdayaan KUKM;
 - d. Memberikan prioritas bagi KUKM yang memiliki potensi dan keahlian, untuk ikut tender atau melaksanakan kegiatan-kegiatan/proyek di lingkungan pemda baik dalam pengadaan barang maupun.

3. Bagi Koperasi dan UKM

- a. Dari hasil kajian dalam menyusun strategi pemberdayaan KUKM bagi masing-masing daerah disesuaikan dengan hasil penelitian dan dalam penerapan strateginya disesuaikan dengan kebijakan pemda dan sumberdaya yang tersedia.
- b. Untuk peningkatan dan pengembangan usaha bagi KUKM dapat memanfaatkan hasil-hasil kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi;
- c. Proaktif melakukan promosi dan pameran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta lainnya dalam meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri;
- d. Bagi Koperasi dan kelompok UKM, perlu mempertimbangkan untuk ikut serta dalam pola penjaminan, bagi para anggotanya yang masih dirasakan kurang memiliki jaminan dan mewakili atau menjembatani dalam pengembangan usaha, termasuk mengembangkan inovasi-inovasi produk, memperjuangkan HAKI dan sertifikasi asset para anggotanya, dan merintis kemitraan dengan perusahaan besar melalui pola *corporate social responsibility* (CSR) sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama;
- e. Menyiapkan pendidikan atau pelatihan pengembangan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan sarana yang dimiliki KUKM untuk mampu bersaing dan profesional. Di samping itu perlu dirintis usaha yang pernah sukses dalam menangani pengadaan pangan, pupuk dan obat-obatan, listrik dan teknologi pasca panca, serta pengelolaan usaha komoditi sembako, pengembangan ritel modern, smesco mandiri, penyaluran obat-obatan/kesehatan, apotik rakyat, resi gudang.